

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa merupakan golongan masyarakat yang mendapatkan pendidikan tertinggi, mempunyai perspektif luas untuk bergerak diseluruh aspek kehidupan serta merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan akademis dan politik.

Mahasiswa merupakan cendekiawan masa depan yang nantinya akan terjun kedalam dunia nyata (masyarakat). Oleh karenanya, mahasiswa berorganisasi dengan membentuk *student government* dalam rangka pengembangan dirinya. Seperti yang disampaikan oleh M. Rusli Karim (1985: 318) bahwa berorganisasi mahasiswa adalah proses dalam menyiapkan diri untuk memasuki organisasi yang lebih besar setelah keluar dari perguruan tinggi. Jika saat berorganisasi mahasiswa telah tertanam kebiasaan disiplin dan patuh terhadap segala tata karma didalam organisasi diharapkan tumbuh pula kesadaran semacam itu kelak setelah terjun ke masyarakat.

Eksistensi organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah salah satu nilai strategis untuk memupuk jiwa kepemimpinan, keberanian mengungkapkan pendapat serta keberanian dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh misalnya dilakukan melalui kegiatan musyawarah mahasiswa atau lazim dikenal dengan istilah MUMAS.

Keikutsertaan mahasiswa dalam sebuah perkumpulan/organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan hak yang melekat dalam diri mahasiswa yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi pasal 109 ayat 1 point (h) dan (i).

- (h) Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- (i) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan

Keberadaan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka pengembangan diri mahasiswa terutama dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi tepatnya pasal 111 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Mengacu kepada peraturan tersebut, penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sebesar-besar dilaksanakan oleh mahasiswa, maka landasan hukum penyelenggaraannya pun merupakan hasil dari kesepakatan anggota yang berhimpun dalam organisasi tersebut dengan tidak bersinggungan dengan aturan dari lembaga (universitas).

Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah sebagai sarana pembelajaran demokrasi dikalangan mahasiswa. Seperti yang diungkapkan

oleh Dodi Rudianto (2010: 12), sejak 1978 kehidupan intra kampus sangat umum ditandai oleh arena kebebasan mimbar akademik yang demokratis. Salah satunya adalah wahana pembelajaran mahasiswa untuk belajar berpolitik didalam kampus dengan instrumen sistem organisasi kemahasiswaan yang egaliter disebutnya sebagai pemerintahan mahasiswa (*student government*).

Ide dasar demokrasi adalah kekuasaan mutlak berada di tangan rakyat, rakyatlah yang berhak membuat dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan sendiri berdasarkan suara mayoritas. Rakyat berhak memilih anggota badan legislatif berdasarkan suara mayoritas. Rakyat berhak memilih penguasa (badan eksekutif) berdasarkan suara mayoritas bahkan rakyat berhak menentukan hakim (badan yudikatif) berdasarkan suara mayoritas pula. Jadi, inti demokrasi adalah segala keputusan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat.

Organisasi kemahasiswaan dijadikan sebagai *miniature state* atau *student government* yang berjalan layaknya sebuah negara. Dalam struktur organisasi kemahasiswaan terdapat pula pembagian kekuasaan sesuai dengan *trias politica* Montesque. Pembagian kekuasaan tersebut terdiri atas badan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan (Badan Eksekutif Mahasiswa), badan legislatif (Dewan Perwakilan Mahasiswa) sebagai pembuat peraturan bersama eksekutif dan badan yudikatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dengan melaksanakan Musyawarah Mahasiswa atau Sidang Umum yang berfungsi untuk meminta laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode, membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, serta

menyelenggarakan sidang istimewa ketika ditenggarai ada penyimpangan yang dilakukan oleh badan eksekutif (BEM) maupun badan legislatif (DPM).

Selain sebagai *miniature state* yang menerapkan *trias politica*, organisasi kemahasiswaan memiliki nilai yang amat strategis terutama dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan forum tertinggi organisasi kemahasiswaan yaitu musyawarah mahasiswa atau sidang umum.

Forum tertinggi tersebut dilaksanakan bak sidang parlemen dalam sebuah negara. Dalam forum tersebut dibahas mengenai agenda acara sidang, tata tertib sidang/rapat, laporan pertanggungjawaban pengurus (eksekutif), pembahasan AD/ART, mekanisme pemilihan ketua organisasi, sampai pada penetapan.

Mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi di organisasi kemahasiswaan tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan tindakan yang mandiri, melatih rasa toleransi terhadap pendapat, kepentingan dan bentuk kehidupan yang berbeda dan untuk mengenali budaya berselisih secara demokratis di mana aturan main standarnya adalah mampu menjadi pendengar, membiarkan orang lain berbicara dan *fairplay*.

Fokus dari sebuah masyarakat demokratis adalah tanggungjawab terhadap diri sendiri dan ikut serta bertanggungjawab yang dapat dilakukan dalam banyak bentuk, salah satunya melalui aktivitas dalam perkumpulan atau organisasi. Akan tetapi pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di organisasi kemahasiswaan sebagai *miniature state* tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Kondisi demikian dapat dilihat dari kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa di beberapa ormawa yang hanya bergerak tatkala menjelang musyawarah mahasiswa saja, padahal nyata-nyata DPM dalam hal ini memiliki tugas untuk membuat peraturan bersama dengan eksekutif (BEM). Jika kondisi tersebut terus dipertahankan dan tak ada pihak yang peduli akan hal tersebut, maka organisasi kemahasiswaan sebagai media pembelajaran demokrasi mahasiswa tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

Permasalahan lain yang ada dalam bidang keormawaan adalah sikap apatis mahasiswa terhadap organisasi. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pemilihan pimpinan/ketua organisasi baik itu melalui mekanisme fraksi dalam musyawarah mahasiswa maupun melalui mekanisme pemilihan umum raya (Pemira) yang mana partisipasi dari mahasiswa sebagai anggota dari organisasi dinilai kurang.

Jika mengacu pada konsep penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, maka pemilihan umum menjadi salah satu cirinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Teuku May Rudy (2007: 87) bahwa “melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan”. Artinya dengan pemilu masyarakat memberi mandat bagi parlemen dan pemerintah untuk mengurus negara. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, yang mana dalam konteks penelitian ini yang menjadi rakyat adalah mahasiswa sebagai anggota organisasi.

Selain dalam pelaksanaan pemilihan pimpinan organisasi, apatisisme mahasiswa juga ditunjukkan oleh keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan

yang dilakukan oleh organisasi (BEM REMA UPI) yang masih kurang. Dalam aksi sebagai wujud kekritisn mahasiswa terhadap berbagai kebijakan (baik lembaga maupun pemerintah) misalnya, seyogyanya untuk ukuran organisasi tingkat universitas seharusnya melibatkan banyak mahasiswa akan tetapi berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam aksi tidak lebih dari 50 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya ketidakpedulian mahasiswa terhadap organisasi serta tidak menjalankan fungsi dirinya sebagai kaum intelektual yang harus peka terhadap segala permasalahan yang terjadi.

Forum diskusi yang diadakan oleh BEM REMA UPI sebagai wahana pembelajaran termasuk didalamnya pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa, ternyata tidak dapat menarik minat mahasiswa terhadap organisasi yang mana jumlah peserta yang terlibat masih sedikit hal itu terlihat ketika pelaksanaan diskusi politik pada tahun 2010 yang hanya dihadiri oleh 25 mahasiswa. Kondisi demikian menjadikan ormawa sebagai laboratorium demokrasi tidak berjalan maksimal.

Melihat data-data dan fakta-fakta yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana organisasi kemahasiswaan berperan sebagai media pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul : **MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI MELALUI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN** (*Studi Kasus Terhadap Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung*)

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis ialah: bagaimana model pembelajaran demokrasi melalui pengembangan organisasi kemahasiswaan?. Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penulisan ini, maka penulis membatasi masalah kedalam beberapa rumusan, antara lain:

1. Bagaimana penerapan sistem demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan?
2. Bagaimana partisipasi politik mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemilihan pimpinan/ketua organisasi?
3. Bagaimana pandangan mahasiswa aktivis dan non aktivis terhadap organisasi kemahasiswaan sebagai media pembelajaran demokrasi?
4. Bagaimana pandangan pembina kemahasiswaan terhadap pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai model pembelajaran demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data model pembelajaran demokrasi melalui pengembangan organisasi kemahasiswaan.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain:

- a) Untuk mengetahui penerapan sistem demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan.

- b) Untuk mengetahui partisipasi politik mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemilihan pimpinan/ketua organisasi.
- c) Untuk mengetahui pandangan mahasiswa aktivis dan non aktivis terhadap organisasi kemahasiswaan sebagai media pembelajaran demokrasi.
- d) Untuk mengetahui pandangan pembina kemahasiswaan terhadap pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai model pembelajaran demokrasi.

D. Asumsi

Berdasarkan pengalaman dan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap organisasi kemahasiswaan, maka penulis dapat mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Apabila penerapan sistem demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan berjalan dengan baik, maka pembentukan karakter mahasiswa yang demokratis akan terbentuk.
2. Partisipasi mahasiswa dalam pemilihan pimpinan/ketua organisasi merupakan salah satu indikator bahwa pendidikan politik dalam sistem demokrasi yang dilakukan oleh ormawa dapat dikatakan berhasil. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Althof bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan didalam sistem politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 1971: 22).
3. Sikap apatis mahasiswa terhadap organisasi berkaitan dengan sistem kaderisasi yang dilakukan oleh Ormawa, oleh karenanya jika kaderisasi

yang dilakukan oleh Ormawa itu baik maka apatisme dalam diri mahasiswa dapat diminimalisir.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya segi ilmu politik.

2. Secara praktis

- a) Diketuainya penerapan sistem demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan.
- b) Diketuainya tingkat partisipasi politik mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemilihan pimpinan/ketua organisasi.
- c) Diketuainya pandangan mahasiswa aktivis dan non aktivis terhadap organisasi kemahasiswaan sebagai media pembelajaran demokrasi.
- d) Diketuainya pandangan pembina kemahasiswaan terhadap pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai model pembelajaran demokrasi.

F. Penjelasan Istilah

1. Mahasiswa: yang dimaksud mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Organisasi kemahasiswaan: yang dimaksud organisasi kemahasiswaan dalam penelitian ini adalah Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Model pembelajaran demokrasi : yang dimaksud model pembelajaran demokrasi dalam skripsi ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum raya (PEMIRA) tatkala memilih pimpinan/ketua organisasi kemahasiswaan (BEM) di Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Sistem demokrasi : yang dimaksud sistem demokrasi dalam penelitian ini adalah sistem pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang sesuai dengan teori *trias politica* yang dicetuskan oleh Montesquieu. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan; kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (Miriam Budiarjo, 2008: 281).
5. Partisipasi politik : yang dimaksud partisipasi politik dalam skripsi ini adalah partisipasi mahasiswa dalam pemilihan ketua/pimpinan organisasi.

G. Subjek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktivis, mahasiswa non aktivis, dan pembina kemahasiswaan. Mahasiswa aktivis dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sering terlibat dalam berbagai kegiatan

kemahasiswaan, khususnya para pimpinan organisasi. Mahasiswa non aktivis adalah mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Pembina kemahasiswaan adalah dosen yang diberikan tugas untuk membimbing dan membina mahasiswa dalam setiap kegiatan kemahasiswaan yang meliputi Pembina kemahasiswaan tingkat jurusan, fakultas dan universitas.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di kampus pusat Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung Jawa Barat. Pemilihan kampus pusat Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penyelenggaraan pemilihan ketua/pimpinan organisasinya pun menggunakan sistem demokrasi yakni melalui pemilihan umum raya (PEMIRA) dan sistem pemerintahannya pun mengimplementasikan teori *trias politica*.